

dan/atau jasa yang digunakannya. Dan di pasal 7 juga berbunyi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif. Di pasal 8 ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari ketiga ayat itu di dalam praktik jual beli #tashaproject sudah sepenuhnya dilakukan oleh penjual. Jika ada keluhan atas penerimaan barang yang tidak sesuai dari pembeli, penjual menerima keluhan itu. Dan menurut para pembeli pelayanan yang terjadi begitu benar dan jujur, jadi para pembeli tidak merasa di diskriminatif oleh penjual. Hak dari pembeli yang mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai juga pihak penjual akan mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang yang baru.

Jadi kesimpulan dari hak *khiyar* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli fashion hijab secara online menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen di toko online Tashaproject sudah berjalan sesuai undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan sistem *retur* atau pengembalian yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

C. Persamaan dan Perbedaan Hak *Khiyar* Konsumen Terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

a) Persamaan Hak *Khīyah* Konsumen Terhadap Sistem *Retur* dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Antara hukum Islam dan hukum perdata yaitu pada undang-undang perlindungan konsumen tentang hak *khīyah* konsumen terhadap sistem *retur* dalam jual beli *Fashion Hijab* secara *Online* menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan hukum Perdata mengatur tentang jual beli dengan sistem *retur* atau pengembalian produk yaitu jika terdapat cacat pada barang.
2. Menurut hukum Islam dan hukum Perdata, ada hak untuk memilih hanya saja berbeda istilah.
3. Hukum Islam dan hukum Perdata mengatur bahwa penetapan harga dan ciri fisik produk dilakukan secara transparan meskipun dilakukan secara *Online*.
4. Menurut hukum Islam dan hukum Perdata jual beli dengan sistem *retur* harus mengandung kata sepakat yang diimbangi dengan hak kewajiban, objeknya tertentu dan mempunyai sebab yang halal untuk memiliki suatu produk.
5. Hukum Islam dan hukum Perdata khususnya Perlindungan Konsumen dibolehkan tukar menukar, dalam artian barang yang sudah disepakati boleh ditukar dengan barang yang sama.

langsung di retur ke penjual untuk diperiksa kembali cacatnya dan akan digantikan dengan barang yang baru.

Tetapi sistem pengembalian barang yang baru dari #tashaproject tidak bisa dipastikan. Produsen/penjual hanya bisa mengkira-kira barang akan dikirim kembali ke pembeli dalam berapa hari. Dikarenakan, produksi *fashion hijab* di #tashaproject ini semuanya *made by order*, artinya setelah pembeli memesan dan melakukan pembayaran baru penjual melakukan produksi barang yang dipesan.

Hal ini yang membuat pembeli merasa digantung karena tidak adanya kepastian. Karena sistem produksinya yang tidak bisa diberikan jangka waktu yang pasti. Tapi dari pihak #tashaproject sendiri selalu memberikan informasi jika barang sudah ready atau barang telah dikirim. Disini menunjukkan kalau pihak penjual #tashaproject sangat memegang tanggungjawab mereka sebagai pelaku usaha yang jujur.